

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KP 314 Tahun 2004**

**T E N T A N G**

**RENCANA OPERASI  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU  
TAHUN 2004 (1425 H)**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada Angkutan Lebaran Tahun 2004 (1425 H), sehingga terselenggara secara tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat, perlu dilakukan perencanaan, pemantauan dan pengendalian secara terpadu;
  - b. bahwa sesungguhnya dengan hal ini tersebut huruf a, perlu diterbitkan Rencana Operasi Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2004 (1425 H), dengan Keputusan Menteri Perhubungan ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 No. 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303);
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
  6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
11. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 313 tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2004 (1425 H)
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2004.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu ;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA OPERASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2004 (1425 H).

**PERTAMA** : Rencana operasi penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2004 (1425 H) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pelaksanaan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2004 (1425 H) sebagai berikut :

- a. **Angkutan Jalan, Kereta Api, Penyeberangan serta Angkutan Udara** dilaksanakan dalam kurun waktu antara Hari Minggu, 7 Nopember 2004 (H-7) pukul 00.00 waktu setempat s/d Hari Senin, 22 Nopember 2004 (H+7) pukul 24.00 waktu setempat,

- b. Angkutan Laut** dilaksanakan dalam kurun waktu antara Hari Sabtu, 30 Oktober 2004 (H-15) pukul 00.00 waktu setempat s/d Hari Selasa, 30 Nopember 2004 (H+15) pukul 24.00 waktu setempat,

- KETIGA** : Untuk pemantauan dan pengendalian Angkutan Lebaran Tahun 2004 (1425 H) dibentuk Posko Tingkat Nasional, Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan secara berjenjang **mulai Hari Minggu, 7 Nopember 2004 (H-7) pukul 00.00 waktu setempat s/d Hari Senin, 22 Nopember 2004 (H+7) pukul 24.00 waktu setempat**
- KEEMPAT** : Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2004 (1425 H) mencakup seluruh wilayah Indonesia, dengan titik berat pada moda darat di wilayah Propinsi Lampung, Pulau Jawa dan Bali secara tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat.
- KELIMA** : Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2004 (1425 H) dilaksanakan melalui persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian oleh masing-masing instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tetap mengutamakan koordinasi antar instansi guna keterpaduan dalam pelaksanaannya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 19 Oktober 2004

---

**MENTERI PERHUBUNGAN**  
ttd

**SOENARNO**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Sekretariat Negara;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9. Panglima TNI;
10. Kepala Kepolisian RI;
11. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
12. Para Gubernur Propinsi seluruh Indonesia;
13. Para Bupati / Walikota;
14. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, Kepala Badan Litbang di Lingkungan departemen Perhubungan;
15. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika;

16. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi seluruh Indonesia;
17. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Kota/Kabupaten seluruh Indonesia;

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN

**KALALO NUGROHO**  
NIP. 120 105 102

**Lampiran : Keputusan Menteri Perhubungan**  
**Nomor : KP 314 TAHUN 2004**  
**Tanggal : 19 OKTOBER 2004**

---

**RENCANA OPERASI  
PENYELENGGARAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU  
TAHUN 2004 (1425 H)**

**I. TUGAS POKOK.**

Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu dibentuk Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI. Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 19 oktober 2004 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2004 (1425H).

Tim Koordinasi yang dikoordinasikan oleh Menteri Perhubungan dengan didukung sejumlah Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 313 Tahun 2004 tanggal 19 Tahun 2004 mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu agar dapat berjalan dengan tertib, cepat aman, nyaman dan selamat.

**II. WILAYAH DAN WAKTU PENYELENGGARAAN.**

**A. Wilayah Penyelenggaraan.**

1. Transportasi Darat.

Mencakup seluruh wilayah Indonesia, dengan titik berat pengendalian terpadu meliputi:

a). Angkutan Jalan

Dititik beratkan pada 8 (delapan) propinsi yaitu : Lampung, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan disiapkan Peta Resmi Informasi Jalur Lebaran 2004 yang akan dibagikan kepada masyarakat secara cuma-cuma.

b). Angkutan Kereta Api

Ditikberatkan pada 9 (sembilan) Daerah Operasi yaitu : Daop I DKI Jakarta, Daop II Bandung, Daop III Cirebon, Daop IV Semarang, Daop V Purwokerto, Daop VI Yogyakarta, Daop II Madiun, Daop VIII Surabaya dan Daop IX Jember.

c). Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Ditikberatkan pada 7 (tujuh) lintasan utama yaitu : Palembang-Muntok, Merak-Bakauheni, Ujung-Kamal, Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Khayangan-Pototano dan Bajo'e-Kolaka.

2. Transportasi Laut.

Mencakup seluruh wilayah Indonesia, dengan titik berat pengendalian terpadu meliputi 50 (lima puluh) pelabuhan laut.

3. Transportasi Udara.

Mencakup seluruh wilayah Indonesia, dengan titik berat pengendalian terpadu meliputi 20 (duapuluh) Bandara.

4. Kegiatan Penunjang.

a). Pelayanan Pos dan Telekomunikasi mencakup seluruh wilayah Indonesia dengan mengkoordinasikan kegiatan POSTEL dalam rangka kesiapsiagaan dan mengendalikan unsur-unsur POSTEL di seluruh wilayah tanggung jawab POSTEL.

b). Pelayanan Badan SAR Nasional .

Pelayanan Badan SAR Nasional mencakup seluruh wilayah Indonesia dengan mengkoordinasikan kegiatan SARNAS dalam rangka kesiapsiagaan dan mengendalikan unsur-unsur SAR di seluruh wilayah tanggung jawab Badan SAR Nasional, dalam rangka mengantisipasi terjadinya musibah/kecelakaan pelayaran, penerbangan, bencana dan musibah lainnya.

c). Pelayanan Meteorologi dan Geofisika.

Pelayanan Meteorologi dan Geofisika mencakup seluruh Wilayah Indonesia yang dipusatkan pada Kantor-kantor Balai Meteorologi dan Geofisika, yaitu : Wilayah I di Medan, Wilayah II di Jakarta, Wilayah III di Denpasar, Wilayah IV di Makassar, Wilayah V di Jayapura dan Kantor Badan Meteorologi dan Geofisika Pusat Jakarta.

## B. Waktu Penyelenggaraan.

Waktu pelaksanaan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2004 (1425 H) dilaksanakan pada :

1. Hari Minggu, 7 Nopember 2004 (H-7) pukul 00.00 waktu setempat s/d Hari Senin, 22 Nopember 2004 (H+7) pukul 24.00 waktu setempat, untuk :
  - a). Angkutan Jalan
  - b). Angkutan Kereta Api
  - c). Angkutan Penyeberangan
  - d). Angkutan Udara
2. Hari Sabtu, 30 Oktober 2004 (H-15) pukul 00.00 waktu setempat s/d Hari Selasa, 30 Nopember 2004 (H+15) pukul 24.00 waktu setempat, untuk Angkutan Laut.
3. Pelaksanaan Kegiatan Pendukung meliputi pelayanan Postel, Sarnas dan Meteorologi dan Geofisika disesuaikan dengan kebutuhan.

Untuk melakukan pemantauan dan pengendalian angkutan lebaran, dan sebagai sarana komunikasi dan informasi, dibentuk Pos Koordinasi (POSKO) Angkutan Lebaran Terpadu baik di Tingkat Nasional, Tingkat Propinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota.

POSKO dilaksanakan secara berjenjang **mulai Hari Minggu, 7 Nopember 2004 (H-7) pukul 00.00 waktu setempat s/d Hari Senin, 22 Nopember 2004 (H+7) pukul 24.00 waktu setempat.**

## III. A S U M S I

Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2004 (1425 H) ini disusun berdasarkan asumsi bahwa selama masa Angkutan Lebaran :

- a. Tidak terjadi gejolak sosial dan atau kerusuhan sosial yang berskala nasional;
- b. Tidak terjadi bencana alam di luar kemampuan;
- c. Tidak terjadi pemogokan operator sarana angkutan;
- d. Tidak terjadi kemacetan lalu lintas di luar prakiraan.

Untuk memudahkan pengaturan dan pendataan dalam penyelenggaraan angkutan lebaran dilakukan dalam dua tahap yaitu pada saat arus mudik dan arus balik.

Yang dimaksud *Arus Mudik* adalah seluruh perjalanan mulai H-7 s/d H2 (jumlah perjalanan hingga H2), sedangkan *Arus Balik* merupakan perjalanan mulai H+1 s/d H+7 (jumlah perjalanan mulai H+1 hingga selesai masa lebaran).

## **IV. KEADAAN DAN MASALAH**

### **A. Keadaan**

1. Lebaran merupakan salah satu kegiatan sosial budaya bangsa Indonesia yang ditandai dengan mengunjungi orang tua, saudara, kerabat atau handai taulan yang dilakukan setahun sekali. Perjalanan ini sebagian besar dilakukan ke kampung halaman yang waktunya secara bersamaan sehingga mengakibatkan permintaan jasa angkutan meningkat dengan tajam, baik moda angkutan darat, laut maupun udara.
2. Disamping meningkatnya lalu lintas orang, lalu lintas barang dan kebutuhan pokok untuk keperluan lebaran juga meningkat dengan drastis.
3. Adanya kebijaksanaan Pemerintah dalam pengaturan Hari Libur dan Cuti bersama ( Idul Fitri tanggal 14 dan 15 Nopember 2004 dilanjutkan cuti bersama mulai tanggal 16 – 19 Nopember 2004) menambah hasrat untuk melakukan perjalanan ke daerah baik untuk tujuan mudik, berlibur atau tujuan lain sehingga membawa konsekuensi pada peningkatan gangguan keamanan, perubahan pola arus mudik yang harus dicermati guna mengurangi terjadinya kemacetan di ruas jalan tertentu dan penumpukan penumpang serta kendaraan di berbagai terminal, dermaga penyeberangan, stasiun kreta api, pelabuhan atau bandar udara tertentu.
4. Dengan memperhatikan kecenderungan angkutan lebaran selama 3 ( tiga ) tahun terakhir mengalami peningkatan, maka diperkirakan jumlah pemudik dan kendaraan yang melakukan perjalanan mudik lebaran tahun 2004 (1425 H) akan cenderung meningkat dibanding dengan angkutan lebaran tahun yang lalu.

### **B. Permasalahan**

#### **1. Gangguan Keamanan**

Berbagai gangguan keamanan cenderung meningkat selama penyelenggaraan angkutan lebaran seperti pemerasan, pencopetan, penipuan, perkelahian, percaloan, pemaksaan, penelantaran penumpang bahkan pelemparan batu ke arah sarana transportasi khususnya bus atau kereta api. Demikian pula ancaman keamanan terhadap kendaraan umum atau pribadi di wilayah tertentu seperti Aceh, Jalur Timur Sumatra, Pantura dll yang dapat mengganggu rasa aman masyarakat.

#### **2. Kemacetan Lalu Lintas**

Meskipun telah dilakukan antisipasi, namun kemacetan lalu lintas khususnya angkutan jalan dimungkinkan masih akan terjadi meskipun telah

dieliminir agar kemacetan yang terjadi tidak dalam kurun waktu yang lama, hal ini disebabkan beberapa faktor seperti pasar tradisional/pasar tumpah, curah hujan tinggi, rendahnya disiplin pengemudi, pungutan/sumbangan di jalan dsb.nya. Adapun titik rawan macet yang dimungkinkan terjadi Pasar Patrol, Pasar Sukra, Pasar Tegal Gubug, Pasar Sukamandi, Pasar Ciasem, tanjakan Nagrek, tanjakan Alas Roban, Pelabuhan Merak-Bakauheni, dst.

### **3. Pelanggaran.**

Pelanggaran cenderung tetap terjadi sebagai akibat kompleks dari kelemahan hukum, eforia reformasi dan adanya lonjakan penumpang seperti pelanggaran tarif, penelantaran penumpang dan atau perlakuan yang kurang baik terhadap penumpang, pelanggaran batas muatan lebih, pelanggaran perijinan dan trayek, pelanggaran terhadap standar keselamatan kelaikan jalan serta pelanggaran lalu lintas dan angkutan.

- 4. Keterpaduan Antar Moda** pada simpul-simpul transportasi tertentu terutama moda jalan dan moda penyeberangan masih dirasakan kurang misalnya “bottle neck” pada pelabuhan penyeberangan, ketiadaan angkutan pendukung pada pelabuhan, tidak adanya bus kota yang melayani pada malam hari, dll.

### **5. Tingkat Disiplin.**

Tingkat disiplin masyarakat baik masyarakat pengguna jasa transportasi, masyarakat penyedia jasa transportasi maupun aparat masih perlu ditingkatkan. Khususnya kebiasaan menyerobot pada antrian yang menyebabkan pelayanan tidak optimal maupun kebiasaan menggunakan jalur yang bukan peruntukannya.

### **6. Musim Hujan**

Curah hujan yang tinggi diperkirakan berlangsung selama masa Angkutan Lebaran 2004 (1425 H) dapat menimbulkan berbagai macam bencana alam baik di darat, laut maupun di udara yang berupa hujan lebat, banjir, tanah longsor, angin kencang dan atau badai, arus dan atau ombak besar, kabut dan cuaca buruk serta petir dan badai magnetik yang dapat mengancam kelancaran serta keselamatan lalu lintas di darat, laut dan udara, juga dapat mengganggu sistem pos dan telekomunikasi.

## 7. Peningkatan Jumlah Penggunaan Kendaraan Pribadi & Sepeda Motor

Peningkatan jumlah pengguna kendaraan pribadi dan sepeda motor yang sangat signifikan terlihat pada pelaksanaan penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun lalu. Khususnya pengguna sepeda motor, mereka melakukannya secara berombongan/platoon dan hal ini secara tidak langsung menyebabkan kemacetan di POM Bensin (SPBU) saat hendak mengisi bensin ataupun hanya untuk melepas lelah.

## 8. Kondisi Prasarana Jalan dan Jembatan.

Berdasarkan hasil survai Tim lapangan Ditjen Perhubungan Darat kondisi prasarana jalan dan jembatan pada jalur Lebaran 2004 (1425 H), secara umum terdapat peningkatan dibanding pada lebaran yang lalu. Lebar jalan rata-rata mencapai 4 lajur/14 meter, namun masih terdapat “bottle neck” di Jalur Pantura dari 4 lajur menjadi 2 lajur terutama di lokasi jembatan dan pasar tumpah. Beberapa ruas jalan di beberapa lokasi masih dilakukan perbaikan, misalnya Jalur Alternatif Pelabuhan Merak-Suralaya-Bojonegara-Pintu Tol Cilegon Timur. Berdasarkan informasi dari Dep. Kimpraswil perbaikan/pembangunan jalan dan jembatan tersebut pada saat penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2004 (1425H) sudah dapat dirampungkan seluruhnya. Adapun mengenai jalan yang berlubang kecil atau kondisi sedang saat ini secara intensif telah dikoordinasikan dengan Dep. Kimpraswil serta instansi yang berwenang di daerah, untuk mendapatkan peningkatan.

## V. PREDIKSI PERMINTAAN ANGKUTAN

### A. Umum

Jumlah masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran 2004 (1425 H) secara total diperkirakan akan mencapai angka sekitar 17,681,156 orang atau **naik sekitar 11 %** dari angkutan lebaran terpadu tahun 2003 (1424 H) yang mencapai angka 15,994,001 orang.

### B. Moda Darat

Penumpang Angkutan Darat diperkirakan mencapai angka 13,823,985 orang atau **naik sekitar 7 %** dan merupakan 78 % dari seluruh jumlah penumpang Angkutan Lebaran, terdiri dari :

1. Angkutan Jalan : 8,460,194 pnp atau naik sekitar 8 %.
2. Angkutan Kereta Api : 3,054,324 pnp atau naik sekitar 5 %.
3. Angkutan Penyeberangan : 2,309,467 pnp atau naik sekitar 5%.

### **C. Moda Laut**

Angkutan Laut diperkirakan mencapai 1,135,675 penumpang atau **naik sekitar 10%**, dan merupakan 6 % dari seluruh jumlah penumpang lebaran.

### **D. Moda Udara**

Angkutan Udara diperkirakan mencapai sekitar 2,721,496 penumpang atau **naik sekitar 35 %**, dan merupakan 15 % dari seluruh jumlah penumpang lebaran.

### **E. Kegiatan Penunjang**

#### 1. Pelayanan Pos dan Telekomunikasi.

- a). Memberi kemudahan dalam rangka komunikasi antara petugas petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran Terpadu 2004 (1425 H);
- b). Pemasangan sambungan baru untuk dipergunakan selama Periode Angkutan Lebaran di Posko Pusat.

#### 2. Pelayanan Badan SAR Nasional.

- a). Kepentingan kelancaran arus lalu lintas untuk kegiatan pengendalian dan inspeksi oleh Menteri Perhubungan dalam rangka pengendalian lalu lintas darat di 8 (delapan) wilayah pengendalian terpadu.
- b). Penanggulangan musibah pelayaran, penerbangan, bencana alam dan bencana lainnya.

#### 3. Pelayanan Meteorologi dan Geofisika.

Penyelenggaraan pelayanan jasa Meteorologi dan Geofisika untuk penerbangan dan Maritim (pelayaran) serta untuk umum.

## V. KESIAPAN SARANA ANGKUTAN

### A. Sarana Angkutan

Kesiapan armada untuk wilayah pengendalian terpadu diprediksikan selama masa angkutan lebaran mampu mengangkut sebanyak 29 juta penumpang, masing-masing moda sebagai berikut :

NO	MODA	JUMLAH ARMADA	DAYA ANGKUT
1.	ANGKUTAN DARAT 1. Angk. Jalan 2. Angk. Kereta Api 3. Angk. SDP	30.569 Bus Reg. 218 KA. 92 Kapal Ro-Ro. 13 Kapal Cepat.	± 14,06 Jt. Penumpang ± 2,77 Jt. Penumpang ± 8,75 Jt. Penumpang
2.	ANGKUTAN LAUT	27 Kpl PELNI 33 Kpl Cepat SWASTA 462 Kpl SWASTA 47 Kpl PERINTIS	± 1,10 Jt. Penumpang
3.	ANGKUTAN UDARA	55 Psw GARUDA 34 Psw MERPATI 8 Psw BOUROQ 15 Psw MANDALA 18 Psw DAS 6 Psw Bali 5 Psw Pelita 4 Psw Trigana 11 Psw Jatayu 1 Psw Kartika 6 Psw Star 3 Psw Sriwijaya 3 Psw Wings Abadi 14 Psw Metro Batavia 2 Psw Riau 6 Psw Deraya 2 Psw Travel Express 3 Psw Adam 20 Psw Lion	± 3,20 Jt penumpang

## **B. Kegiatan Penunjang**

1. Pelayanan Pos dan Telekomunikasi.

Membantu dalam hal penyediaan alat komunikasi penunjang angkutan lebaran Tahun 2004 (1425 H) berupa saluran telepon, Radio Trunking, PSTN.

2. Pada lebaran tahun ini akan digunakan CCTV untuk memonitor kondisi angkutan lebaran pada titik-titik lokasi tertentu yang dipandang perlu antara lain di terminal, stasiun KA, pelabuhan penyeberangan dan di lintas Pantura. CCTV dioperasikan secara online di Pos Koordinasi Terpadu Pusat, Jl. Merdeka Barat 8 Jakarta.

3. Untuk sistem informasi juga dilakukan melalui internet dengan Alamat Website : <http://www.hubdat.go.id>.

4. Pelayanan Badan SAR Nasional.

Badan SAR Nasional menyiapkan Helikopter, Resque Truk, Resque Jeep, Resque Team dan Resque Boat.

## **C. Kondisi Darurat**

Apabila diperlukan, kepada Panglima TNI dapat dimintakan bantuan alat angkutan baik alat angkutan darat (bus, truk), angkutan laut (kapal laut) dan angkutan udara (pesawat udara) sesuai kemampuan yang tersedia pada TNI.

## **VI. KESIAPAN PRASARANA**

### **Moda Darat**

1. Berdasarkan hasil survai Tim lapangan Ditjen Perhubungan Darat kondisi prasarana jalan dan jembatan pada jalur Lebaran 2004 (1425 H), secara umum terdapat peningkatan dibanding pada lebaran yang lalu. Pada Jalur Pantura (Cikampek-Cirebon-Semarang), terdapat beberapa ruas jalan yang telah dilakukan overlay, dan penambahan beberapa jalan baru/lingkar seperti : Fly Over Pamanukan, Jalan By Pass Lohbener, Jalan By Pass Bumiayu, Jatibarang By Pass, Jalan By Pass Pelen Baru, Jalan Tol Baru Dawuan-Sadang, Pelebaran Viaduk Jatibarang, Jalan Tol Palimanan-Plumbon-Kanci dan Jalan Tol Baru Padalarang-Cikamuning. Sedangkan untuk Propinsi Lampung, ketiga jalur utama Angkutan Lebaran (Jalur Lintas Barat Sumatra, Jalur Lintas Tengah Sumatera dan Jalur Lintas Timur Sumatera) sudah dapat dipergunakan.

Berikut Data Jalur Lebaran pada Pelaksanaan Angkutan Lebaran 2004 :

No	Propinsi	Jalur Lebaran (Km)	Jalur (Km)	Paniang (Km)
1	Sumatera	861.0	381.0	1.242.0
2	Lampung	658.0	345.0	1.003.0
3	Rante	103.7	156.8	260.5
4	Jawa Barat	958.5	785.8	1.744.3
5	Jawa	1.215.4	936.2	2.151.6
6	DI	188.9	164.0	352.9
7	Jawa	1.295.9	687.7	1.983.6
8	Bal	457.0	141.0	598.0
	Tota	5.738.5	3.597.6	9.336.1

Sumber : Depkimpraswil

Sedangkan jumlah arus lalu lintas untuk Wilayah Jabodetabek pada masa Angkutan Lebaran 2004 (1425 H) secara total diperkirakan akan mencapai angka sekitar 2.661.170 atau **naik sekitar 8 %** dari jumlah total arus lalu lintas Angkutan Lebaran 2003 (1424 H) yang mencapai angka 2.464.046

Disamping itu akan dilakukan koordinasi dengan Depkimpraswil menyangkut kesiapan prasarana jalan dan jembatan dan penentuan langkah-langkah antisipasi yang perlu diambil.

2. Terminal Bus yang dipersiapkan di 8 propinsi dengan pengendalian terpadu berjumlah 28 terminal bus utama dan 5 terminal bus bantuan.

NO	PROPINSI	TERMINAL UTAMA	TERMINAL BANTUAN
1	2	3	4
1	LAMPUNG	a) Rajabasa, Bandar Lampung	
2	DKI JAKARTA	1) Lebakbulus 2) Kalideres 3) Pulogadung 4) Kampung Rambutan	1) Senayan 2) Mampang 3) Jalan Raya Bekasi 4) Kebon Jeruk 5) Cilandak

NO	PROPINSI	TERMINAL UTAMA	TERMINAL BANTUAN
1	2	3	4
3	JAWA BARAT	1) Baranangsiang, Bogor 2) Bekasi 3) Leuwi Panjang, Bandung 4) Cicaheum, Bandung 5) Cileunyi, Bandung 6) Harjamukti, Cirebon 7) Banjar, Ciamis 8) Depok 9) Cilembang, Tasik	
4	BANTEN	1) Merak, Cilegon 2) Pakupatan, Serang	
5	JAWA TENGAH	1) Tegal 2) Purwokerto 3) Terboyo, Semarang 4) Tirtonadi, Solo	
6	DI YOGYAKARTA	1) Giwangan, Yogyakarta 2) Jombor, Sleman 3) Wonosari, Gunung Kidul	
7	JAWA TIMUR	1). Osowilangun, Surabaya 2). Bungurasih, Surabaya 3). Madiun 4). Malang	
8	BALI	1). Ubung, Denpasar	
	JUMLAH	28	10

3. Jaringan jalan kereta api dan kelengkapan keselamatannya sedang dipersiapkan untuk menampung melonjaknya frekuensi perjalanan kereta api, demikian pula telah dipersiapkan 64 stasiun di 9 Daop yang siap untuk dilakukan pengendalian secara terpadu.
4. Lintasan Penyeberangan yang dipersiapkan di 8 propinsi dengan pengendalian terpadu berjumlah 7 lintasan meliputi : Palembang-Muntok, Merak-Bakauheni, Ujung-Kamal, Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar dan Khayangan-Pototano, Bajo'e-Kolaka.

### **Moda Laut**

Terdapat 50 pelabuhan yang akan dilakukan pemantauan/pengendalian terpadu.

## **Moda Udara**

Akan dikendalikan secara terpadu pada 20 bandara yaitu : Jakarta (CGK), Medan (MES), Denpasar (DPS), Surabaya (SUB), Ujung Pandang (UPG), Balikpapan (BPN), Jogjakarta (JOG), Solo (SOC), Palembang (PLM), Semarang (SRG), Banjarmasin (BDJ), Manado (MDC), Pontianak (PNK), Biak (BIK), Padang (PDG), Banda Aceh (BTJ), Pangkal Pinang (PGK), Mataram (AMI), Ambon (AMO) dan Pekanbaru (PKU).

## **VII. PENGATURAN DAN PENGENDALIAN**

### **A. Umum**

1. Menyediakan, menyelenggarakan, mengamankan dan mengatur arus lalu lintas dan angkutan darat, laut dan udara serta mengupayakan keselamatan selama perjalanan dari Jakarta dan kota – kota lainnya ke tempat tujuan dengan tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran dilaksanakan berlandaskan prinsip keterpaduan antar angkutan darat, laut dan udara, didukung oleh seluruh sub sektor perhubungan terkait.
3. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pelayanan Pos dan Telekomunikasi bagi masyarakat, serta bagi dukungan penyelenggaraan angkutan lebaran.
4. Di setiap Propinsi, oleh Gubernur dibentuk Satuan Tugas Tim Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tingkat Propinsi terdiri dari berbagai unsur terkait serta mengikutsertakan potensi masyarakat.
5. Di setiap Kabupaten/Kota, oleh Bupati/Walikota dibentuk Satuan Tugas Tim Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tingkat Kabupaten Kota yang terdiri dari berbagai unsur terkait serta mengikutsertakan potensi masyarakat.
6. Dalam upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal, bekerjasama YLKI akan dilakukan pemantauan terhadap pelayanan jasa angkutan dengan menampung keluhan-keluhan masyarakat.
7. Dengan koordinasi dengan aparat keamanan secara intensif akan dilakukan upaya-upaya untuk pengendalian/pencegahan terjadinya percaloan.

## **B. Transportasi Darat.**

1. Melihat posisi DKI Jakarta sebagai pusat penyebaran penduduk, maka arus lalu lintas kendaraan penumpang dari Jakarta bergerak menuju tiga jurusan utama dengan menggunakan angkutan jalan baik jalan bebas hambatan (Tol) maupun jalan umum, dan lintas penyeberangan sebagai berikut :
  - a. Arah Timur melalui jalur Pantura (Jakarta-Cikampek-Pamanukan-Cirebon-Tegal-Pekalongan-Semarang)
  - b. Arah Selatan menuju jalur Selatan (Jakarta-Bandung-Ciamis-Wangon-Kebumen-Jogyakarta-Solo)
  - c. Arah Barat menuju Merak – Bakauheni (Sumatera)
2. Selain Jalur Utama tersebut, terdapat jalur alternative dengan kondisi yang terbatas melalui :

### **a. Jalur Utama**

- 1) Dari Arah Jawa Timur & Jawa Tengah :
  - a). Semarang-Bawen-Magelang-Purworejo
  - b). Solo-Yogyakarta-Purworejo  
melalui Kebumen-Wangon-Banjar-Ciamis-Tasikmalaya-Malangbong-Bandung-Padalarang/Cikamuning (Jalan Tol Padalarang Cileunyi)-Purwakarta-Jalan Tol Cikampek-Jakarta
- 2) Dari Arah Tegal menuju Jakarta, melalui Tegal-Slawi-Ajibarang-Wangon-Banjar-Ciamis-Tasikmalaya-Malangbong-Bandung-Padalarang/Cikamuning (Jalan Tol Padalarang Cileunyi)-Purwakarta-Jalan Tol Cikampek-Jakarta
- 3) Dari arah Cirebon menuju Jakarta, melalui Cirebon-Kuningan-Cikijing-Ciamis-Tasikmalaya-Malangbong-Bandung-Padalarang/Cikamuning (Jalan Tol Padalarang Cileunyi)-Purwakarta-Jalan Tol Cikampek-Jakarta

### **b. Jalur Alternatif**

Slawi-Ketanggungan-Ciledug-Kuningan-Cikijing-Majalengka, meliputi :

- 1) Kadipaten-Sumedang-Bandung-Padalarang-Plered-Purwakarta-Jalan Tol Cikampek-Jakarta;
- 2) Kadipaten-Sumedang-Bandung-Cianjur-Sukabumi-Bogor-Jakarta;
- 3) Kadipaten-Sumedang-Bandung-Cianjur-Puncak-Jalan Tol Jagorawi-Jakarta;
- 4) Kadipaten-Sumedang-Jalan Cagak-Subang-Sadang-Jalan Tol Cikampek-Jakarta;
- 5) Kadipaten-Cijelag-Subang-Sadang-Jalan Tol Cikampek-Jakarta

3. Untuk setiap Ibu kota Propinsi agar dilakukan pemantauan dan pengaturan pergerakan pemudik yang keluar/masuk selama periode Angkutan Lebaran 2004 (1425 H).
4. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran dilaksanakan dalam 3 (tiga) kegiatan pokok, yaitu Kegiatan Pemberangkatan (Arus Mudik), Kegiatan Pengamanan dan Pengaturan lalu lintas dan angkutan sepanjang jalur lebaran serta Kegiatan Arus Balik.
  - a). Kegiatan Pemberangkatan.
    - 1) Penyelenggaraan dan pengaturan pemberangkatan diarahkan untuk mendorong masyarakat melaksanakan mudik lebaran secara tidak bersamaan.
    - 2) Mendorong dan mengembangkan agar perusahaan swasta dapat menyediakan angkutan mudik gratis (sistem charter), hal ini sangat membantu pemudik serta dapat mengurangi kepadatan karena diberangkatkan sebelum periode puncak.
    - 3) Mendorong manajemen perusahaan swasta untuk memberikan THR secara dini kepada para pekerja dan pegawai sehingga dapat memanfaatkan kebijakan mudik tidak secara bersamaan.
    - 4) Khusus untuk angkutan jalan agar ditingkatkan pengaturan kelancaran lalu lintas kendaraan di tempat-tempat rawan kemacetan, rawan kecelakaan, rawan bencana alam di sepanjang jalur lebaran.
    - 5) Untuk kesiapan sarana dalam rangka peningkatan keselamatan dilakukan pemeriksaan kelaikan jalan terhadap armada yang akan diberangkatkan baik di terminal-terminal maupun di pool armada.
    - 6) Peningkatan antisipasi terhadap arus puncak Lebaran yang biasanya terjadi antara H – 3 s/d H – 1, sehingga dapat mengurangi dampak negatif yang timbul sejalan dengan kebijaksanaan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
  - b). Kegiatan Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Sepanjang Jalur Lebaran.

Penyelenggaraan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan di sepanjang jalur angkutan lebaran, di simpul – simpul lalu lintas dan angkutan baik di DKI Jakarta maupun kota – kota lainnya perlu mendapat perhatian untuk terwujudnya kondisi lalu lintas dan angkutan sepanjang perjalanan secara lebih tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat. Simpul – simpul lalu lintas dan angkutan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1) Terminal Penyeberangan Merak – Bakauheni.

- (a) Peningkatan pengaturan kelancaran serta ketertiban arus lalu lintas penumpang dan kendaraan, mulai dari masuk terminal, masuk dan keluar Ferry maupun kapal laut (dengan peningkatan fasilitas rambu/ informasi lainnya) guna menjamin kelancaran dan keselamatan penyeberangan dan pelayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (b) Koordinasi dengan POLRI dan instansi terkait setempat dalam pengaturan dan pengamanan pemberangkatan kendaraan dari lokasi penampungan/ kantong-kantong parkir menuju dermaga, pengaturan kendaraan umum dan pribadi serta truk yang mengangkut bahan-bahan tertentu yang harus mendapat prioritas penyeberangan.
- (c) Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh aparat terkait secara terpadu di bawah koordinasi Kepala Cabang PT (Persero) ASDP dan atau pejabat yang ditunjuk. Pengaturan jumlah trip untuk kapal ferry maupun kapal cepat disesuaikan dengan kebutuhan dan bila diperlukan bantuan angkutan penyeberangan berupa kapal TNI-AL dan atau kapal bantuan lainnya dengan tarif yang disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat.

2) Gerbang tol Cikopo/Cikampek.

Pengaturan kelancaran, ketertiban dan keselamatan arus lalu lintas kendaraan pada ruas jalan Jomin – Cikopo – Sadang guna mencegah kemungkinan terjadinya konflik lalu lintas di pertigaan Cikopo dan Sadang antara kendaraan yang bergerak dari arah yang berlawanan. ***Untuk monitoring tol Cikopo ini akan dilengkapi dengan peralatan CCTV.***

- (a) Diperlukan penambahan gerbang tol secara seri untuk pembayaran Tol dan penambahan petugas Jasa Marga untuk membagikan tiket masuk tol, sesuai dengan kebutuhan serta langkah-langkah manajemen lalu lintas untuk mengurangi kemacetan.
- (b) Pengalihan arus lalu lintas melalui Gerbang tol Kahuripan dan atau Gerbang tol Karawang Timur dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

3) Jalan Tol Arjawinangun-Plumbon-Ciperna Cirebon.

- (a) Pengaturan kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas di gerbang tol Arjawinangun, sepanjang ruas jalan tol Arjawinangun -

Ciperna dan di ujung tol Ciperna serta perlintasan sebidang jalur kereta api menjelang Cirebon.

(b) Pengaturan kelancaran arus lalu lintas yang melintasi simpang Palimanan yang menjadi titik rawan kemacetan.

4) Kawasan Arjawinangun – Jatibarang – Karang Ampel – Cirebon.

Pengantisipasi kemacetan ruas jalan Jatibarang – Arjawinangun perlu pengaturan pengalihan arus lalu lintas ke ruas jalan Jatibarang – Karang Ampel – Cirebon.

5) Persimpangan Pejagan (Losari).

Pengaturan dan penertiban arus lalu lintas di simpang Pejagan sebagai titik penyebaran arus lalu lintas menuju Semarang dan menuju Purwokerto melalui Ketanggungan dan ke arah Kuningan melalui Ciledug.

6) Jalan Tol Padalarang – Cileunyi.

(a) Ujung Tol Padalarang

Pengaturan dan penertiban arus lalu lintas di wilayah Padalarang yang disebabkan adanya pertemuan arus lalu lintas dari arah Cianjur dan Purwakarta serta Bandung. Diperlukan penambahan Gerbang tol secara seri untuk pembayaran tol dan penambahan petugas PT. Jasa Marga (Persero) guna membagikan tiket masuk tol sesuai dengan kebutuhan.

(b) Ujung Tol Cileunyi.

Diperlukan manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan pengendalian petugas pada persimpangan dekat gerbang tol Cileunyi serta wilayah sekitarnya, untuk menghindari/mengurangi kemacetan lalu lintas bagi kendaraan yang keluar/masuk gerbang tol Cileunyi maupun yang akan menuju Sumedang atau Nagrek.

7) Nagrek.

Pengaturan dan penertiban lalu lintas sepanjang jalur Selatan antara Limbangan-Nagrek yang rawan kemacetan/kecelakaan akibat tanjakan curam, pasar dan persilangan sebidang dengan kereta api.

8) Lintas Wangon – Batas Jawa Barat

Pada jalur selatan karena curah hujan yang tinggi, sangat rawan terhadap bahaya banjir dan longsor seperti di wilayah Kebumen (rawan banjir) dan pada ruas jalan antara Wangon – Batas Jawa Barat (rawan longsor) dan terdapat 15 titik rawan longsor yang dapat diidentifikasi

9) Lintas Penyeberangan.

Terminal penyeberangan, Ujung-Kamal, Ketapang-Gilimanuk, Padang Bai-Lembar dan Kayangan-Pototano mengacu kepada pengaturan di terminal penyeberangan Merak-Bakauheni dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan.

10) Kereta Api.

(a) Pemantauan dilakukan untuk memeriksa kesiapan operasional kereta api antara lain:

- ❑ Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka);
- ❑ Kesiapan stasiun-stasiun pemberangkatan;
- ❑ Pemantauan kesiapan operasional kereta api, meliputi:
  - Kereta api reguler;
  - Kereta api tambahan;
  - Kereta api sapujagat.
- ❑ Mencari informasi lokasi-lokasi rawan longsor dan rawan kecelakaan;
- ❑ Mengidentifikasi dan mengantisipasi daerah-daerah yang sering mendapat gangguan pelemparan.

(b) Lokasi kegiatan pemantauan operasional Kereta api, meliputi:

- ❑ Lintas Jakarta – Bandung – Kroya di DAOP I dan II;
- ❑ Lintas Jakarta – Cirebon – Semarang di DAOP I, III dan IV;
- ❑ Lintas Cirebon – Kroya – Solo - Yogyakarta di DAOP III, V dan VI;
- ❑ Lintas Semarang – Surabaya di DAOP IV dan VII;

- Lintas Solo – Madiun – Surabaya di DAOP VI, VII dan VIII;
- Lintas Surabaya – Banyuwangi – Kroya di DAOP VIII dan IX;

Satuan Tugas Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu mengatur kelancaran, ketertiban dan keselamatan arus kendaraan di sepanjang perjalanan sesuai dengan daerah tanggung jawab masing-masing serta harus mewaspadai akan terjadinya arus balik bus penumpang yang perlu mendapat prioritas pengaturannya, agar dapat kembali ke Jakarta, ke Bandung, ke Semarang dan kota-kota asal lainnya secepat mungkin. Hal ini dimaksudkan guna menghindari atau mengurangi gejolak, rasa tidak puas dan bahkan rasa panik bagi para pemudik yang biasanya sudah lama menunggu angkutan di berbagai terminal pemberangkatan bus yang sudah disediakan.

c). Kegiatan Angkutan Arus Balik.

Puncak arus balik diperkirakan terjadi lima hari setelah lebaran kedua (H+5), akan tetapi biasanya mulai terjadi pada H + 3 sampai H + 7. Khusus arus balik dengan angkutan kereta api pada umumnya berlangsung lebih panjang sehingga perlu diwaspadai hal – hal sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan pengaturan arus lalu lintas angkutan penumpang dan kendaraan harus terus ditingkatkan, terutama dalam rangka menjamin kelancaran, ketertiban dan keselamatan masyarakat yang umumnya sudah lelah dengan bekal yang sudah sangat terbatas.
- 2) Kebanyakan penumpang arus balik tiba kembali di kota pada malam hari, dan sering menghadapi kesulitan memperoleh pelayanan angkutan kota, lebih-lebih pada saat ini armada angkutan kota yang dapat disediakan untuk angkutan malam hari jumlahnya sangat terbatas.
- 3) Menyediakan secara maksimal segala fasilitas yang dapat membantu pelayanan bagi para penumpang yang sengaja bermalam di terminal bus menunggu siang hari karena alasan keamanan

### C. Transportasi Laut.

1. Angkutan Lebaran melalui transportasi laut meliputi angkutan penumpang kapal laut, angkutan bahan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, cabe merah, bawang merah, kacang tanah, daging sapi, daging ayam, dan telur serta angkutan ternak potong untuk memenuhi kebutuhan di wilayah JABOTABEK dan kebutuhan di wilayah lainnya sesuai dengan

program instansi terkait seperti Bulog, Deperindag dan Dep. Pertanian.

2. Pengaturan dan perencanaan operasional meliputi sistim pelayanan, keselamatan pelayaran dan pengangkutan bahan pokok dan ternak potong.
3. Untuk pengendalian dan pemantauan perlu memperhatikan lonjakan penumpang dan atau situasi persediaan dan harga bahan pokok dengan cara bekerjasama (koordinasi) dengan instansi terkait.
4. Guna menjamin kelancaran pelaksanaan Angkutan Lebaran melalui transportasi laut di seluruh Indonesia, ditetapkan rencana operasi moda laut.

#### **D. Transportasi Udara.**

1. Dengan arus penumpang melalui udara yang diperkirakan mengalami kenaikan 35 %, perlu dipersiapkan tindakan untuk memaksimalkan utilitas pesawat udara berjadwal maupun tidak berjadwal (borongan) dan penambahan jam operasi Bandara.
2. Peningkatan pelayanan sistem reservasi dan memperkecil atau meniadakan “*Over Booking*” untuk menjamin kelancaran dan kepastian keberangkatan penumpang.
3. Penyediaan informasi yang lengkap, jelas dan tersebar antara lain tentang rute penerbangan, kapasitas yang tersedia, jadwal penerbangan, counter transit dan ruang transit di 20 bandara.
4. Pengaturan kelancaran, ketertiban, keselamatan dan keamanan penerbangan pada semua Bandara, terutama pada Bandara – Bandara yang cukup padat antara lain Soekarno Hatta - Jakarta, Polonia - Medan, Juanda - Surabaya, Ngurah Rai - Denpasar, Hasanuddin - Makasar.
5. Peningkatan pelayanan check in/lapor diri di bandar udara untuk menjamin kelancaran dan ketertiban keberangkatan penumpang pada Bandara yang cukup padat seperti tersebut di atas.

#### **E. Lokasi Posko, Jaringan Komunikasi Posko/ Sistem Informasi**

##### **1. Lokasi Posko**

Untuk mengantisipasi kondisi dan situasi saat pelaksanaan angkutan lebaran seperti:

- Pelayanan penumpang di terminal dan stasiun terutama pada saat jumlah penumpang mencapai puncak;
- Pengalihan arus lalu lintas angkutan barang dan kendaraan tidak umum pada saat mendekati hari puncak;
- Perubahan arus lalu lintas secara insidental untuk daerah rawan macet, rawan kecelakaan dan bencana alam.

Maka diperlukan pembentukan Posko-Posko di tiap-tiap terminal maupun stasiun utama seperti Terminal : Kampung Rambutan, Pulo Gadung, Lebak Bulus, Merak, Kalideres, Damri Kemayoran, Tirtonadi, Tegal, Harjamukti, Cicaheum, Purwokerto; stasiun: Gambir, Senen, Tawang, Poncol, Solo Balapan, Tegal, Kutoarjo.

Disamping itu untuk pengaturan dan pengendalian lapangan pada lokasi-lokasi kritis, rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas dibentuk adanya Pos Koordinasi Lapangan (Poskorlap) yang dilaksanakan selama masa penyelenggaraan angkutan lebaran.

Kegiatan Poskorlap yang secara koordinatif melibatkan personel dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Propinsi/Kabupaten/Kota dan Polri dilaksanakan dengan menggunakan pola statis dan mobile dengan lokasi sebagai berikut:

- Ujung Tol Gerem
- Ujung Tol Cikampek
- Nagrek
- Kadipaten
- Patrol
- Padalarang
- Sadang

## 2. Jaringan Komunikasi Posko/Sistem Informasi.

Untuk membantu memudahkan koordinasi dan komunikasi antara posko yang satu dengan yang lain diperlengkapi dengan alat komunikasi pada tiap-tiap posko baik menggunakan radiu trunking, telepon/ faximile (No. 021 3506129; 3506138). Untuk hubungan komunikasi dengan **Pos Koordinasi Harian Angkutan Lebaran Terpadu** yang berada di **Ruang**

***Majapahit Lantai 2 Gedung Karsa Departemen Perhubungan, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta***, disamping peralatan komunikasi tersebut dalam sistem informasi akan digunakan juga website <http://www.hubdat.go.id> .

Pada lebaran tahun 2004 (1425 H) ini dalam monitoring kondisi lalu lintas dan angkutan akan dilakukan dengan menggunakan fasilitas CCTV yang ditempatkan pada titik-titik : Padalarang, Nagrek, Palimanan, Kadipaten, Patrol, Cileunyi, Stasiun Gambir, Pelabuhan Penyeberangan Merak/Bakauheni, Bandara Soetta, Bandara Juanda, Pelabuhan Tj. Priok, Pelabuhan Tj. Perak dan Pelabuhan Makassar yang on-line dengan Pos Koordinasi Harian Angkutan Lebaran Terpadu yang secara efektif Pos Koordinasi tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal 7 Nopember 2004 pukul.08.00 WIB sampai dengan tanggal 22 Nopember 2004 pkl. 08.00 WIB.

## **VIII. KEBIJAKSANAAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN.**

Meningkatkan kualitas keselamatan dan pelayanan kepada masyarakat dalam suasana serba keterbatasan serta melaksanakan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2004 (1425 H) secara tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat melalui berbagai upaya sebagai berikut :

### **A. Umum.**

1. Mengutamakan faktor keselamatan dan kelancaran lalu lintas darat, laut dan udara serta keterpaduan intra dan antar moda;
2. Melakukan sosialisasi dan publikasi atas seluruh kebijaksanaan dan pengaturan Angkutan Lebaran 2004 (1425 H) kepada seluruh lapisan masyarakat, operator angkutan dan petugas pelaksana, berupa penyebaran peta resmi jalur lebaran kepada para pemudik, pemasangan spanduk sosialisasi dan publikasi di sepanjang jalur lebaran.
3. Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan publikasi melalui media cetak, elektronik maupun jaringan informasi lainnya secara intens yang mencakup kesiapan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, dan udara) dan antisipasi permasalahan-permasalahan menonjol yang mungkin terjadi.
4. Dengan mengutamakan faktor keselamatan, dilakukan optimasi daya angkut sarana angkutan penumpang umum dengan memberikan dispensasi muatan **10%** di atas ketentuan yang berlaku untuk bus, **60%** untuk kereta api ekonomi dan **30 %** untuk kereta api klas bisnis dan **30%** untuk kapal ferry penyeberangan.

5. Menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi Angkutan Lebaran 2004 (1425 H) yang lebih cepat dan akurat dengan penggunaan CCTV dan website : [www.hubdat.go.id](http://www.hubdat.go.id)
6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sektor terkait.
7. Meningkatkan penertiban, pengaturan, pengamanan dan pengawasan secara terkoordinasi dalam penyelenggaraan angkutan lebaran.
8. *Untuk anggota veteran dan para manula diberikan diskon tiket (ditentukan kemudian).*
9. Harga tarif angkutan darat, laut dan udara dicantumkan secara jelas di loket dan untuk angkutan darat khususnya bus umum dicantumkan dengan jelas di dalam bus.

#### **B. Transportasi Darat.**

1. Dalam rangka peningkatan kelancaran arus lalu lintas di sepanjang jalur lebaran di pulau Jawa, maka dilakukan rekayasa dan manajemen lalu lintas di jalan dengan dikeluarkannya Instruksi Dirjen Perhubungan Darat Nomor : Ins.07/AJ.108/DRJD/2004 tanggal 12 Oktober 2004 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dan Penutupan Jembatan Timbang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2004 (1425 H), yang antara lain berisi :
  - a). Melakukan pengaturan lalu lintas berupa pelarangan sementara kendaraan angkutan penumpang tidak umum dan angkutan barang, kecuali kendaraan angkutan penumpang umum untuk melalui ruas jalan Pantai Utara (Pantura) Tegal–Cirebon–Cikampek dari arah Timur (Jawa Tengah dan Jawa Timur) ke arah Barat (Jakarta) mulai tanggal 10 Nopember 2004 (H-4) jam 00.00 WIB s/d tanggal 14 Nopember 2004 (H1) jam 24.00 WIB, sementara arus lalu lintas angkutan penumpang “tidak umum” (kendaraan pribadi) dan angkutan barang (*kecuali angkutan BBM, ternak, bahan pokok, susu murni, pupuk dan barang antaran pos*) dialihkan melalui jalur Selatan dengan mengantisipasi daerah rawan longsor pada ruas dan jalur alternatif, sedangkan jalur Utara dari arah Barat ke arah Timur, tidak mengalami perubahan.

- b). Melarang dioperasikannya truk pengangkut bahan bangunan dan truk bersumbu lebih dari 2 (dua), truk tempelan, truk gandengan dan kontainer mulai tanggal 10 Nopember 2004 (H-4) jam 00.00 WIB s/d tanggal 14 Nopember 2004 (H1) jam 24.00 WIB di Pulau Jawa, kecuali untuk angkutan BBM, ternak, bahan pokok (beras, gula pasir, terigu, minyak goreng, cabe merah, bawang merah, kacang tanah, daging sapi, daging ayam dan telur), pupuk, dan barang antaran pos;
  - c). Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi di Wilayah Propinsi Lampung, Pulau Jawa dan Bali untuk menutup pengoperasian seluruh jembatan timbang mulai tanggal 7 Nopember 2004 (H-7) pukul 00.00 WIB s/d tanggal 22 Nopember 2004 (H+7) pukul 24.00 WIB
  - d). Khusus untuk pengangkutan barang-barang ekspor/impur dengan kontainer dari wilayah perkotaan yang menuju pelabuhan ekspor Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Tanjung Mas serta sebaliknya, pengaturannya dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi secara koordinatif dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota setempat pada waktu dan lintas yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas pada jalur utama Angkutan Lebaran 2004/ 1425 H.
  - e). Dalam hal terjadi kemacetan arus lalu lintas insidental dapat dilakukan perubahan arus lalu lintas secara buka tutup (tidal flow) sesuai dengan kondisi lapangan dengan tetap memberikan prioritas utama pada angkutan umum.
  - f). Bagi pengemudi yang melanggar antrian dengan menggunakan lajur dari arah yang berlawanan akan dilakukan penindakan hukum.
2. Dikeluarkan Instruksi Dirjen Perhubungan Darat Nomor : Ins. 06/AJ.206/DRJD/2004 tanggal 12 Oktober 2004 tentang Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor sebagai Sarana Angkutan pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2004 (1425 H) yang mengatur tentang pelaksanaan pengaturan/pengawasan penggunaan sepeda motor selama masa Angkutan Lebaran 2004/1425 H untuk moda angkutan jalan mulai tanggal 7 November 2004 (H-7) pukul 00.00 WIB s/d tanggal 22 November 2004 (H+7) pukul 24. 00 WIB sebagaimana berikut :
- a). Setiap sepeda motor wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - b). Setiap pengendara sepeda motor baik pengemudi maupun penumpang wajib menggunakan helm;
  - c). Melarang penggunaan sepeda motor dengan kereta samping ataupun sepeda motor beroda tiga (modifikasi);
  - d). Cara penempatan barang tidak boleh melebihi lebar kemudi, agar

keseimbangan berkendara tetap terjaga dan tidak mengganggu arus lalu lintas dan pengguna jalan lainnya;

- e). Setiap sepeda motor hanya diperkenankan mengangkut 2 orang penumpang, termasuk anak-anak;
  - f). Setiap pengendara sepeda motor wajib menjaga jarak aman saat berjalan beriringan dan tidak diperkenankan untuk berjalan berdampingan kecuali dalam keadaan/kondisi khusus, dengan kecepatan maksimum 80 km/jam;
  - g). Menggunakan jalur lambat, jika tidak memungkinkan atau tidak tersedia jalur lambat dapat menggunakan jalur utama pada lajur paling kiri;
  - h). Untuk keselamatan, kepada pengendara sepeda motor dihimbau untuk menggunakan lampu utama dekat ketika dalam perjalanan walaupun siang hari;
3. Kepada para petugas terminal, dihimbau untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan peralatan tanggap darurat untuk setiap bus yang hendak berangkat sebagai salah satu upaya peningkatan keselamatan penumpang;
  4. Selama masa Angkutan Lebaran 2004 (1425 H) agar dihindarkan segala bentuk kegiatan yang dapat menghambat kelancaran arus lalu lintas lebaran. Bus angkutan lebaran bergerak langsung menuju ke kota tujuan dan hanya berhenti di Terminal Bus sesuai dengan Kartu Pengawasan.

### **C. Transportasi Laut.**

1. Memberikan prioritas sandar kapal penumpang dan hewan serta kapal pengangkut bahan pokok (beras, terigu dan gula);
2. Memberikan dispensasi terhadap kapal barang untuk mengangkut penumpang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Meningkatkan kewaspadaan, kelancaran, ketertiban, keamanan & keselamatan prasarana & sarana transportasi laut;
4. Memberikan dispensasi kelebihan penumpang sesuai ketentuan keselamatan pelayaran;
5. Meminta dukungan pengoperasian kapal TNI AL dalam rangka mengatasi kekurangan kapasitas kapal berdasarkan kebutuhan yang nyata.

### **D. Transportasi Udara.**

1. Penambahan jam operasi Bandar udara sesuai dengan kebutuhan dan fasilitasnya;

2. Pengamanan Bandar udara terutama ditempat-tempat yang rawan;
3. Untuk mengantisipasi meningkatnya gangguan keamanan di Bandar udara, telah dikeluarkan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Udara Nomor. AU.4840/PKP. 1355 tanggal 10 Oktober 2004 yang mengatur tentang Instruksi untuk melaksanakan screening pengamanan sesuai prosedur standar operasi pengamanan penerbangan sipil dengan peningkatan pada segi tertentu;
4. Kepada Kepala Bandar udara telah diperintah untuk ikut memantau pemberlakuan tarif;
5. Untuk menampung lonjakan permintaan, penambahan kapasitas dapat dilakukan penerbangan malam hari pada kota-kota besar.

#### **E. Pos dan Telekomunikasi.**

1. Meningkatkan layanan jasa pos antara lain dengan :
  - a). Menyediakan loket/tempat khusus di beberapa gedung perkantoran besar yang menyediakan Kartu Lebaran dan sekaligus berfungsi sebagai tempat penerimaan/pengiriman Kartu Lebaran, yang diberi nama "Pojoek Lebaran".
  - b). Mempekerjakan karyawan lepas yang berasal dari para pensiunan pos dan pelajar untuk melayani lonjakan produksi jasa pos.
  - c). Menyediakan sarana dan fasilitas tambahan pelayanan pos.
2. Melakukan pengamanan Sistem Komunikasi Angkutan Lebaran 2004 (1425 H) dengan melaksanakan monitoring spektrum frekuensi radio.

### **IX. PENGORGANISASIAN**

#### **A. KOORDINASI**

##### **1. KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT.**

Untuk memperoleh efektifitas yang tinggi dalam pelaksanaannya perlu dilakukan koordinasi sbb. :

**a. Koordinasi dengan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah**

- 1.) Melakukan kunjungan bersama kelapangan untuk memperoleh data tentang keadaan dan prasarana jalan dan jembatan, sebagai acuan untuk melakukan perbaikan, peningkatan atau pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas dan angkutan lebaran;
- 2.) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan keselamatan di jalan tol dan meningkatkan segala fasilitas untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas disemua jalan tol;
- 3.) Mempersiapkan sarana dan fasilitas untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan, bencana alam atau kejadian lain yang mengganggu kelancaran angkutan lebaran;

**b. Koordinasi dengan Departemen Dalam Negeri.**

Koordinasi dilakukan agar Menteri Dalam Negeri dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota agar penyelenggaraan angkutan lebaran dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib.

**c. Koordinasi dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.**

Koordinasi dilakukan dalam pengaturan kelancaran distribusi bahan pokok selama masa Angkutan Lebaran 2004 (1425 H).

**d. Koordinasi dengan Departemen Kesehatan.**

Untuk meningkatkan kegiatan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang ada pada lokasi-lokasi tertentu pada jalur Angkutan Lebaran 2004 (1425 H) kepada masyarakat pemudik yang memerlukan bantuan kesehatan.

**e. Koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi**

Melakukan penyebaran informasi Angkutan Lebaran 2004 (1425 H) kepada seluruh masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Angkutan Lebaran 2004 (1425 H).

**f. Koordinasi TNI**

- 1.) Melakukan koordinasi untuk memperoleh bantuan alat transportasi baik angkutan laut, angkutan darat maupun angkutan udara milik TNI sesuai kemampuan yang tersedia, apabila sewaktu-waktu diperlukan.
- 2.) Melakukan koordinasi untuk memperoleh bantuan pengamanan, khususnya bagi daerah atau lintasan yang dipandang perlu.

**g. Koordinasi dengan Kepolisian RI.**

Menyiapkan dan melaksanakan langkah/tindakan penegakan hukum untuk meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan, sejalan dengan Rencana Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2004 (1425 H) dan Rencana Operasi Ketupat Lebaran 2004 (1425 H).

**h. Koordinasi dengan Departemen Pertambangan dan Energi** dalam rangka pengaturan/penyediaan BBM.

**i. Koordinasi dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi** dalam pengaturan mudik bersama

**j. Koordinasi dengan Departemen Pertanian**, dalam rangka kelancaran distribusi penyediaan bahan pangan.

**k. Koordinasi dengan PT. (Pesero) Jasa Raharja** dalam rangka pelayanan asuransi apabila terjadi kecelakaan.

**l. Koordinasi dengan Para Gubernur** selaku **Koordinator Pelaksana Tingkat Propinsi** Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2004 ( 1425 H ) di masing-masing Propinsi, agar melakukan langkah-langkah untuk menciptakan angkutan lebaran yang aman, tertib dan lancar di wilayahnya dengan kegiatan :

- 1.) Menyusun rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran sesuai situasi dan kondisi daerah masing – masing dengan mengacu kepada Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2004 ( 1425 H ) Tingkat Nasional.
- 2.) Mengkoordinasikan Bupati/Walikota di wilayahnya untuk menyusun rencana dan program kerja dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas serta mempersiapkan kebutuhan angkutan yang diperlukan dalam penyelenggaraan angkutan di wilayah masing-masing, baik darat,

laut maupun udara.

- 3.) Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2004 ( 1425 H ).
  - 4.) Mempersiapkan fasilitas umum dan memberikan kemudahan – kemudahan yang diperlukan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
  - 5.) Membentuk Tim Pos Koordinasi Terpadu di tingkat Propinsi sebagai sarana komunikasi dengan Pos Koordinasi Pusat dan Pos Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota.
  - 6.) Menyampaikan laporan harian penyelenggaraan angkutan lebaran kepada Menteri Perhubungan melalui Pos Koordinasi Pusat.
  - 7.) Melakukan optimalisasi dan perbaikan prasarana transportasi di wilayahnya sesuai kewenangannya.
  - 8.) Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.
- m. **Koordinasi dengan Para Bupati / Walikota** selaku **Koordinator Pelaksana Tingkat Kabupaten / Kota** Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2004 ( 1425 H ) di masing-masing Kabupaten/Kota, agar melakukan langkah-langkah untuk menciptakan angkutan lebaran yang aman, tertib dan lancar di wilayahnya dengan kegiatan :
- 1.) Menyusun rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran sesuai situasi dan kondisi daerah masing – masing dengan mengacu kepada Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2004 ( 1425 H ) Tingkat Nasional dan Propinsi.
  - 2.) Menyusun rencana dan program kerja dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas serta mempersiapkan kebutuhan angkutan yang diperlukan dalam penyelenggaraan angkutan di wilayah masing-masing, baik darat, laut maupun udara.
  - 3.) Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi dalam rangka penyelenggaraan angkutan lebaran.
  - 4.) Melakukan optimalisasi dan perbaikan prasarana transportasi di wilayahnya sesuai kewenangannya.
  - 5.) Mengambil langkah – langkah yang diperlukan untuk mengurangi

terjadinya kemacetan dan kecelakaan serta mengantisipasi daerah rawan bencana alam ( banjir, tanah longsor, kabut ) di wilayahnya.

- 6.) Mengawasi pelaksanaan tarif angkutan, kelaikan kendaraan dan tanggap darurat serta mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku apabila dijumpai pelanggaran.
- 7.) Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional melalui Koordinator Pelaksana Tingkat Propinsi.

## **2. KOORDINASI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

### **a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.**

- 1.) Menjabarkan Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2004 (1425 H) dalam Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2004 (1425 H).
- 2.) Bersama instansi terkait mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan angkutan pada masa Angkutan Lebaran.
- 3.) Menyiapkan petugas dan peralatan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Angkutan Lebaran secara terencana khususnya kemampuan analisis dan cara bertindak yang tepat.
- 4.) Merencanakan dan melaksanakan latihan/gladi kemampuan penyelenggaraan sebelum pelaksanaan Angkutan Lebaran.
- 5.) Mengatur personil dan peralatan komunikasi baik yang bersifat stasioner, mobile maupun khusus untuk kepentingan komunikasi penyelenggaraan Angkutan Lebaran.
- 6.) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.
- 7.) Menyiapkan Posko Angkutan Lebaran Terpadu.

### **b. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.**

- 1.) Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan angkutan laut pada masa Angkutan Lebaran 2004 (1425 H)
- 2.) Memanfaatkan secara maksimal sarana dan prasarana angkutan laut yang dapat dioperasikan untuk mendukung Angkutan Lebaran .
- 3.) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan Mabes TNI-AL.
- 4.) Menyiapkan Posko Angkutan Lebaran.

**c. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.**

- 1.) Mengkoordinasikan seluruh unit kerja angkutan udara dan instansi terkait dalam Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2004 (1425 H).
- 2.) Menyiapkan secara maksimal sarana dan prasarana yang dapat dioperasikan untuk mendukung Angkutan Lebaran.
- 3.) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan Mabes TNI-AU.
- 4.) Menyiapkan Posko Angkutan Lebaran.

**d. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi**

- 1.) Mengkoordinasikan seluruh unit kerja pelayanan jasa Pos dan Telekomunikasi baik BUMN maupun Swasta Nasional untuk mendukung kelancaran pelayanan masyarakat dalam merayakan Lebaran 2004 (1425 H).
- 2.) Mengkoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana serta personil untuk membantu dan menampung peningkatan kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa Pos dan Telekomunikasi dalam rangka Hari Raya Lebaran.
- 3.) Mengkoordinasikan penyediaan fasilitas tambahan pelayanan jasa Pos dan Telekomunikasi untuk lebih memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam rangka merayakan Hari Raya Lebaran.
- 4.) Mengkoordinasikan dan membantu penyiapan sistem komunikasi dan informasi pada Posko Angkutan Lebaran.
- 5.) Mengkoordinasikan dan melaksanakan Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dalam rangka Pengamanan Sistem Komunikasi Angkutan Lebaran.
- 6.) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait

**e. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.**

Melakukan analisis dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan angkutan lebaran.

**f. Badan SAR Nasional.**

- 1.) Mengkoordinasikan kesiapan, kesiagaan dan pengendalian unsur-unsur SAR di seluruh wilayah tanggung jawab SARNAS, dalam rangka mengantisipasi terjadinya musibah pelayaran, penerbangan

dan bencana lainnya.

- 2.) Mempersiapkan serta mengendalikan unsur SAR di Pusat dan Daerah, dalam penanggulangan musibah maupun untuk kepentingan pemantauan arus lalu lintas.

**g. Badan Meteorologi dan Geofisika.**

Memberikan informasi sesuai dengan bidang tugasnya kepada seluruh instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2004 (1425 H), khususnya pada musim Hujan dan musim Barat.

**3. KOORDINASI DENGAN INSTANSI lainnya seperti :**

Koordinasi dengan Asosiasi/ Organisasi Masyarakat seperti ORGANDA, INACA, INSA, GAPASDAP, GAIKINDO, IMI, MTI, MASKA, TVRI, RRI, RCTI, SCTV, ANTV, TPI, INDOSIAR, RADIO SONORA, RADIO SALVATORE, ORARI, RAPI, PRSNI, YLKI, ORGANISASI PEMUDA DAN PRAMUKA untuk membantu pelaksanaan kelancaran dan pengamanan dalam rangka mendukung keberhasilan Angkutan Lebaran.

**B. LOGISTIK DAN ANGGARAN, PENGENDALIAN SERTA INSTRUKSI**

**1. Logistik dan Anggaran**

- a. Dukungan logistik untuk penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2004 (1425 H) menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.
- b. Kebutuhan biaya untuk pelaksanaan Angkutan Lebaran disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada unit kerja masing-masing.

**2. Pengendalian Penyelenggaraan.**

- a. Di Tingkat Pusat oleh Menteri Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dirjen Perhubungan Darat.
- b. Di tingkat Propinsi dilaksanakan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan/ LLAJ Propinsi setempat.
- c. Di tingkat Kabupaten atau Kota dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan /LLAJ Kota / Kabupaten setempat.
- d. Laporan kepada Menteri Perhubungan dilaksanakan setiap hari dan/atau setiap saat dibutuhkan.

### **3. Lain-lain :**

- a. Koordinasi perencanaan antar Departemen, antar sektor dan antar instansi baik di Tingkat Nasional maupun daerah diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dengan unsur Perhubungan sebagai pihak yang mengambil inisiatif.
- b. Berbagai hambatan dan kerawanan yang terjadi di lapangan agar diatasi secara terkoordinasi disesuaikan dengan kondisi dan situasi spesifik daerah oleh instansi terkait sesuai dengan tugas dan wilayah tanggung jawab masing - masing.
- c. Tingkatkan dan mantapkan koordinasi serta kerjasama lintas sektoral antar instansi terkait dengan melibatkan masyarakat di wilayah masing - masing.
- d. Cegah dan hindari kegiatan dan atau tindakan over acting dan perbuatan negatif lain yang dapat menghambat kelancaran penyelenggaraan angkutan lebaran.
- e. Kesiapan personil dilakukan oleh masing-masing instansi yang bersangkutan. Perkuatan baik personil maupun sarana dikoordinasikan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kebutuhan baik oleh pusat maupun daerah.
- f. Gelar apel kesiapsiagaan petugas dilaksanakan secara serentak sesuai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- g. Hari H (Idul Fitri 1425 H) akan disesuaikan berdasarkan penetapan Pemerintah oleh Menteri Agama.

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**SOENARNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN

**KALALO NUGROHO**  
**NIP. 120105102**